

# ISU Sepekan

Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik

Minggu ke-4 Bulan April 2021

(tanggal 23 April s.d. 29 April 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## UPAYA DAN TANTANGAN DALAM MENARIK INVESTASI PADA MASA PANDEMI

Mandala Harefa

Peneliti Utama/Kebijakan Ekonomi Publik

mandala.harefa@dpr.go.id.

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Upaya pemerintah menarik investasi pada tahun ini cukup menantang, di mana realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing pada 3 bulan pertama tahun ini diprediksi masih terhambat sejalan dengan belum tuntasnya pemberantasan wabah Covid-19 yang menahan perputaran roda ekonomi. Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (y-o-y). Adapun, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp111,7 triliun, tumbuh 0,6% (q-t-q) dan 14% (y-o-y). Investasi dalam negeri tercatat Rp108 triliun, tumbuh secara kuartalan 4,2% dan turun 4% dari tahun lalu. PMA mencapai 50,8% pada kuartal I/2021. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai 47,9% atau Rp105,3 triliun.

Berdasarkan negara asal, PMA yang masuk ke Indonesia di kuartal I tahun ini paling banyak dari Singapura (US\$2,6 miliar), disusul Tiongkok (US\$1,0 miliar), Korea Selatan (US\$900 juta), Hong Kong (US\$800 juta), dan Swiss (US\$500 juta). Lebih lanjut, penyebaran PMA dan PMDN di Indonesia dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PMDN lebih banyak berinvestasi di Pulau Jawa dan PMA di luar Pulau Jawa. Secara terperinci, PMA yang berinvestasi di luar Pulau Jawa berada di daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp8,0 triliun, Sulawesi Tengah Rp8,4 triliun, Jawa Barat Rp21,1 triliun, DKI Jakarta Rp14,7 triliun, dan Riau Rp8,1 triliun. Dari gambaran tersebut, PMDN lebih memilih wilayah aman yang infrastrukturnya mendukung, tersedianya tenaga kerja terampil, dan produktif.

Ada dua faktor yang menyebabkan melambatnya laju investasi dan realisasinya. *Pertama* pada periode Januari-Maret tahun lalu Indonesia masih belum terdampak pandemi. *Kedua*, investor global pada saat ini masih *wait and see* sejalan dengan belum tuntasnya penanganan pandemi. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan investor menunda atau menggagalkan realisasi investasinya antara lain masalah perizinan hingga persoalan administrasi. Demikian pula isu pengadaan dan pembebasan lahan, serta mendapatkan perizinan berusaha khususnya sebelum pandemi.

Pemberian insentif mencakup kebijakan *tax holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan ternyata belum mampu mendorong investasi. Secara ideal, diharapkan insentif tersebut dapat menciptakan *trade off* dengan nilai tambah ekonomi. Isu lain, seharusnya kebijakan fasilitas pajak kepada investor perlu dievaluasi agar kebijakan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan investasi. Terlebih setelah semakin luasnya kewenangan BKPM menjadi Kementerian Investasi untuk menarik investasi akan menjadi *keep point* untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan investasi dari luar maupun dalam negeri, pemerintah daerah maupun pusat, sehingga target investasi Rp900 triliun dapat tercapai.

### SUMBER

Bisnis Indonesia, 26,27,29 April 2021; Media Indonesia, 27,29 April 2021.